

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia atau *Outstanding boundary problems* (OBP) di Kalimantan Utara khususnya di Pulau Sebatik merupakan masalah kompleks yang perlu diselesaikan, karena dalam setiap proses penyelesaiannya terdapat beberapa faktor yang mempersulit kedua negara untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah ini, dan masalah perbatasan ini merupakan masalah yang sangat penting bagi kedua negara karena terkait erat dengan kedaulatan nasional.

Sebagai negara yang berdaulat, baik Indonesia maupun Malaysia yang keduanya sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa perbatasan di Pulau Sebatik dapat dilihat bahwa metode penyelesaian sengketa yang dilakukan atau ditempuh kedua negara adalah metode penyelesaian secara damai, yaitu dengan cara negosiasi atau perundingan, yang didasari oleh asas *Uti Possidetis*. Kemudian berlanjut dengan pembentukan tim khusus untuk menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara teratur bertemu dengan delegasi kedua belah pihak setiap tahun di tingkat *Joint Boundary Committee*, *Joint Boundary Technical Committee* dan *Co-Project Director*.

Pemerintah Indonesia pun memiliki beberapa strategi, dimana Presiden Jokowi telah memprioritaskan persengketaan perbatasan darat ini ke dalam

Nawacita dan telah membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Presiden Jokowi pun telah membentuk Lembaga khusus terkait masalah ini, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah (BNPP Kalimantan Utara dan BNPP Kab. Nunukan)

Sulitnya penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul dalam setiap titik permasalahan yaitu adanya pengaruh dari tidak mengetahuinya alur politik luar negeri negara lain dalam hal ini adalah Malaysia, pengaruh dari dalam sendiri yakni perbedaan persepsi antar Kementerian/Lembaga yang terlibat, kondisi masyarakat perbatasan atau berkaitan dengan *accessibility*, pengaruh kondisi alam atau patok dan pengaruh dari teknologi yang digunakan oleh kedua negara. Sehingga hal-hal tersebut sampai saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi setiap negara bahkan kedua negara untuk sama-sama mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap titik OBP di Kalimantan Utara, sejauh ini kedua negara juga telah banyak berupaya melakukan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik upaya dalam bentuk kerjasama melalui organisasi-organisasi yang telah terbentuk dalam permasalahan ini adalah *General Boudier Committee* (GBC), *Joint Indonesia Malaysia* (JIM), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan upaya diplomasi kedua negara ataupun upaya yang dilakukan secara internal oleh masing-masing negara yakni dengan pembentukan dasar-dasar hukum sebagai acuan penyelesaian permasalahan.

Terlihat pembangunan PLBN dilakukan di Pulau Sebatik. Namun dengan hal-hal yang dilakukan tersebut sampai saat ini pula belum mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan. Melihat kondisi saat ini yang memang ada kendala pandemic Covid-19 sehingga pembuatan MOU masih terhambat. Penyelesaian masalah perbatasan negara juga akan berdampak pada keamanan nasional suatu negara, dimana perbatasan dapat menjadi pintu segala sesuatu mulai dari luar negeri hingga ke dalam negeri, yang tentunya dapat menimbulkan ketegangan di dalam negeri.

Dalam hal ini kerjasama Indonesia-Malaysia memiliki kepentingan strategis bagi pengembangan sikap saling menghormati dan saling menguntungkan, dan masing-masing negara memiliki peluang untuk memajukan perdamaian antar tetangga yang terpisah satu sama lain. Negara-negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri, yang harus dicapai melalui strategi yang berbeda.

Penyelesaian permasalahan batas darat antara Indonesia dan Malaysia membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya diplomasi bilateral berkelanjutan antara kedua negara tetapi juga harus memiliki sikap saling respek dari kedua negara. Bagi Indonesia sendiri khususnya harus mampu menjadi pihak yang bisa mempertahankan posisinya secara pasti terkait sengketa perbatasan di Pulau Sebatik di Kalimantan Utara dan agar tetap konsisten serta mendukung hasil kesepakatan tegas batas kedua negara yang telah dilaksanakan di lapangan dengan dasar-dasar yang telah disepakati. Diplomasi Indonesia yang dilakukan dengan Malaysia dalam upaya penyelesaian persengketaan ini juga harus dikawal dengan

sikap penuh kewibawaan, menunjukkan kekuatan dan tegas dalam melakukan segala sesuatu sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Saran bagi Pemerintah

Meskipun pihak pemerintah telah melakukan berbagai upaya secara teknis di lapangan atau wilayah-wilayah perbatasan terutama di wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, namun dalam proses penyelesaian sengketa ini baik apabila melibatkan kalangan akademisi untuk mendukung kualitas penyusunan dan implementasi strategi yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah terkait.

Kemudian, harus adanya koordinasi yang lebih terstruktur antar Kementrian maupun Lembaga, baik Lembaga Pusat dan Daerah.

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan daerah perbatasan, karena ancaman sekecil apapun tentunya akan membuat sengketa ini menjadi lebih alot. Kesejahteraan masyarakat di perbatasan pun harus lebih diperhatikan, bisa dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

2) Saran bagi masyarakat

Penyelesaian permasalahan perbatasan membutuhkan dukungan secara penuh dari masyarakat secara umum, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan terjangkau ke wilayah masyarakat perbatasan. Dukungan yang sangat

diperlukan adalah menumbuhkan rasa nasionalisme bagi masyarakat perbatasan sehingga mereka dalam kehidupannya meskipun sangat dekat dengan negara tetangga namun mereka masih memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu masyarakat

3) Saran bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan batasan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Widodo terlebih studi kasus yang diambil adalah pada tahun 2019-2020 dimana adanya pengukuran ulang yang dilakukan oleh kedua negara di Pulau Sebatik yang telah melakukan progresnya namun sampai saat ini permasalahan masih belum selesai, baik itu kendala teknis maupun lainnya, salah satunya akibat adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya penundaan dibuatnya Nota Kesepahaman (MOU). Sehingga perlu adanya pemantauan lebih lagi bagi penelitian selanjutnya tentang perkembangan-perkembangan proses penyelesaian sengketa perbatasan di pulau Sebatik, maupun di beberapa titik OBP di Kalimantan baik Kalimantan Barat maupun Utara baik di tahun-tahun yang akan datang ataupun perkembangan di masa presiden-presiden selanjutnya. Hal lain yang perlu ditambahkan untuk penelitian selanjutnya adalah melihat tentang bagaimana strategi pemerintah melalui masyarakat atau strategi pengembangan masyarakat yang sampai saat ini belum ada secara maksimal.